

## Peran Kendal sebagai kawasan ekonomi khusus dalam transformasi ekonomi: analisis strategis dan implementasi melalui matriks SWOT

Sudati Nur Sarfiah\*, Yustirania Septiani, Rr. Retno Sugiharti  
Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

\*) Korespondensi (e-mail: [sudatinur12@gmail.com](mailto:sudatinur12@gmail.com))

### Abstract

Since being designated as a Special Economic Zone (KEK), Kendal is expected to be able to become the axis of the economy on the island of Java. The establishment of KEK especially KEK Kendal is expected to stimulate investment and business growth which will have an impact on increasing employment and reducing poverty. Nationally, the purpose of creating KEK is economic equity, especially in terms of income and the competitiveness of national products. The establishment of a special economic zone requires careful preparation and commitment from all interested parties to support the implementation of the area's activities. The preparations include policies and institutions, incentives and financing, as well as infrastructure completeness according to the spatial plan. While special economic zones can offer many benefits, on the other hand many special economic zones have been criticized for their high social and economic costs. The purpose of this research is to formulate an appropriate strategy for the development of the Kendal area as a special economic zone. The SWOT matrix that has been formed has described how the strategy can be carried out in the future.

Keywords: Special Economic Zone, Kendal, SWOT, Regional development strategy

### Abstrak

Sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kendal diharapkan mampu menjadi poros perekonomian di Pulau Jawa. Pembentukan KEK, khususnya KEK Kendal diharapkan dapat merangsang pertumbuhan investasi maupun usaha yang akan memberikan dampak pada perekonomian khususnya peningkatan lapangan kerja yang pada akhirnya akan menurunkan angka kemiskinan. Secara nasional, tujuan diciptakannya KEK adalah pertama, memperkecil gap atau ketimpangan khususnya dari segi ketimpangan pendapatan, dan kedua untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Pembentukan kawasan ekonomi khusus memerlukan persiapan yang matang dan komitmen dari semua pihak. Persiapan yang diperlukan meliputi kebijakan dan kelembagaan, insentif dan pembiayaan, serta kelengkapan infrastruktur sesuai rencana tata ruang. Meskipun Kawasan Ekonomi Khusus dapat menawarkan banyak manfaat, namun di sisi lain keberadaan zona ekonomi khusus menjadi polemic karena biaya sosial dan ekonominya yang tinggi. Dari kajian literatur, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang tepat untuk pengembangan kawasan Kendal sebagai kawasan ekonomi khusus. Matriks SWOT yang dibuat menggambarkan bagaimana strategi dapat diimplementasikan di masa depan.

Kata kunci: Kawasan Ekonomi Khusus, Kendal, SWOT, Strategi pengembangan Wilayah

*How to cite:* Sarfiah, S. N., Septiani, Y., & Sugiharti, R. R. (2023). Peran kendal sebagai kawasan ekonomi khusus dalam transformasi ekonomi: analisis strategis dan implementasi melalui matriks SWOT. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 3(1), 47–65. <https://doi.org/10.53088/jerps.v3i1.601>

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang Pemerintah Provinsi No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Provinsi berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi daerah dan pengelolaan bersama. Tujuan pemberian kewenangan yang luas kepada daerah adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, pemberian kewenangan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing yang berpegang pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhasan, keistimewaan, dan keberagaman dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat implementasi keberlanjutan yang semakin nyata di era otonomi daerah dan globalisasi, setiap daerah harus menyusun paket otonomi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melibatkan seluruh komponen yang ada, termasuk DPRD, untuk memastikan proses desentralisasi berjalan dengan baik. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, investasi daerah menjadi kekuatan penting yang dapat membantu mempercepat pembangunan daerah. Namun, dalam menciptakan investasi membutuhkan agenda yang jelas dan komprehensif yang disusun oleh pemerintah daerah. Agenda ini termasuk misalnya perumusan kebijakan penanaman modal, penyempurnaan peraturan perundang-undangan, penyempurnaan dukungan dan pelayanan birokrasi, pengembangan kegiatan promosi daerah, pengembangan kemitraan, pengembangan pengelolaan daerah, pengembangan jaringan usaha, dan penajaman strategi belanja publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, Kawasan Industri merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengembangkan industri hijau dan meningkatkan daya tarik investasi. Dasar dibentuknya kawasan industri adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan investasi, ekspor, impor, dan dunia usaha, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjadi katalisator reformasi ekonomi. Minimnya kawasan industri, khususnya di Provinsi Jawa Tengah membuat investor mempertimbangkan kembali investasi di Jawa Tengah. Saat ini baru ada tujuh kawasan industri di Jawa Tengah, enam di antaranya berada di Semarang dan satu di Kabupaten Cilacap. Dalam rangka meningkatkan jumlah kawasan industri, Pemerintah Jawa Tengah memilih Kabupaten Kendal sebagai kawasan industri baru. Dalam pembangunannya, Pemerintah Kabupaten Kendal menetapkan tiga desa di Kecamatan Kaliwungu yaitu Desa Mororejo, Desa Sumberejo dan Desa Wonorejo sebagai kawasan industri.

Kabupaten Kaliwungu terpilih sebagai kawasan industri karena letaknya yang strategis di bentangan jalan pesisir utara dengan topografi dataran tinggi di sisi selatan dan laut di sisi utara. Selain itu, kawasan Kaliwungu merupakan *buffer zone* ibu kota provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan kota Semarang, dan memiliki layanan pendukungnya meliputi (i) pelabuhan Kendal (ii) kedekatan dengan

pelabuhan Tanjung Emas Semarang, (iii) stasiun kereta api dengan jaringan kereta api aktif jalur ganda 123 (iv) terletak di dekat Bandara Internasional Ahmad Yani, yang disebut-sebut sebagai daya tarik pengembangan kawasan ekonomi khusus.

Secara umum, Mulyadi dan Monstiska dalam (Maramis, 2013) menyatakan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi pada kawasan industri, pertama, permasalahan lingkungan hidup, hal ini menyangkut masalah perizinan pengelolaan limbah yang semakin condong mengikuti peraturan konvensi lingkungan hidup internasional. Permasalahan ini, akan berpengaruh terhadap izin usaha industri, izin import bahan baku, serta izin ekspor. Kedua, permasalahan tata ruang kawasan industri, dimana peraturan mengenai tata ruang kawasan industri telah tertuang dalam PP Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, namun masih ada beberapa industri yang didirikan di luar kawasan industri. Ketiga, permasalahan atas dukungan dan komitmen pemerintah daerah, dimana dalam banyak kasus, pemerintah daerah kerap mengeluarkan Perda yang bertentangan dengan peraturan kawasan industri terutama mengenai perizinan dan mekanisme insentif yang menarik bagi investor. Dan keempat, permasalahan energi, hal ini terkait kekurangan energi listrik maupun gas, yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam kawasan industri.

Selain permasalahan di atas, kawasan industri dituntut untuk memiliki kondisi fisik serta sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan. Akan tetapi, melihat kenyataan yang ada di lapangan dimana pengembangan kawasan industri Kendal tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, dan cenderung kurang. Pembagian lahan untuk kawasan industri tersebut sulit didapatkan, dari semula lahan seluas 2.830 hektar yang ditargetkan hanya 1.100 hektar lahan yang dikembangkan sebagai kawasan industri.

Secara historis, Pemerintah Kabupaten Kendal pernah melaksanakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dicanangkan pada tahun 2006. Lokasi pembangunan KEK tersebut berada di lokasi yang saat ini dibangun sebagai Kawasan Industri Kendal, namun proses pembangunan KEK tidak berjalan lancar karena keterbatasan anggaran dan masih minimnya investor dari luar Jawa Tengah saat itu. Selain itu, penyediaan tenaga kerja murah dan fasilitas perizinan KEK yang belum rampung sepenuhnya juga menjadi kendala. Ketika kemudian oleh pemerintah pusat, Kendal telah ditetapkan sebagai KEK, maka pemerintah daerah harus menyusun strategi khusus untuk mengembangkan KEK Kendal dengan menciptakan iklim investasi yang menarik sehingga mampu menarik investor untuk berinvestasi di KEK Kendal.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **Konsep Pembangunan Ekonomi**

Menurut Adam Smith, pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang memadukan pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi (Suryana, 2000). Todaro (dalam publikasi (Lepi T. Tarmidi, 1992) mendefinisikan pembangunan sebagai proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap sosial dan institusi nasional, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi

ketimpangan dan menghapuskan kemiskinan absolut. Sedangkan definisi perkembangan ekonomi menurut Irawan dan Suparmoko (1996) adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa, yang sering diukur dengan pendapatan per kapita riil. Lebih lanjut Prof. Meier menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses peningkatan pendapatan riil per kapita dalam jangka waktu yang lama (Adisasmita, 2005). Diperkuat oleh Sukirno (1985) yang mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses meningkatkan pendapatan per kapita penduduk masyarakat dalam jangka panjang. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa pembangunan ekonomi merupakan perubahan yang terjadi secara terus menerus melalui perpaduan berbagai proses untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, yaitu pertumbuhan pendapatan per kapita yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Empat unsur penting pembangunan ekonomi yaitu:

- a) Pembangunan sebagai proses. Pembangunan merupakan fase yang harus dilalui oleh setiap masyarakat atau bangsa. Misalnya orang dilahirkan, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi harus melalui tahapan pertumbuhan. Demikian pula setiap bangsa harus melalui tahapan-tahapan pembangunan untuk menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera.
- b) Pembangunan sebagai perubahan sosial. Masyarakat sebagai agen perubahan sosial secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kelancaran pembangunan suatu negara.
- c) Pembangunan sebagai upaya peningkatan pendapatan per kapita. Dalam hal ini diperlukan kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan seluruh komponen bangsa untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan agar mampu meningkatkan pendapatan. Adanya peningkatan pendapatan per kapita mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- d) Pertumbuhan pendapatan per kapita harus terjadi dalam jangka panjang. Perekonomian suatu negara dapat dikatakan berkembang jika pendapatan per kapita cenderung meningkat dalam jangka panjang. Namun, ada pengecualian ketika bencana alam atau kerusuhan politik menyebabkan penurunan ekonomi suatu negara karena keadaan tersebut bersifat sementara. Hal terpenting bagi suatu negara adalah kegiatan ekonominya tumbuh dari tahun ke tahun.

### **Konsep Otonomi Daerah**

Hakikat dari otonomi daerah adalah pembangunan manusia yang mandiri. Dalam hal ini diberikan kebebasan untuk mengungkapkan secara optimal peluang terbaik setiap individu. Selain itu, dalam mengembangkan kepentingan masyarakat setempat disesuaikan dengan keinginan masyarakat, guna meningkatkan ketersediaan dan efisiensi sumber daya administrasi dalam rangka kepentingan bersama dan pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Tugas menyelenggarakan otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan negara dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat atas

prakarsa sendiri. Perwujudan otonomi daerah tidak hanya didasarkan pada hukum, tetapi juga pada realisasi tuntutan perkembangan globalisasi sehingga memberikan daerah kekuasaan yang lebih luas untuk mengatur, mengeksplotasi, dan mengeksplorasi kemungkinan sumber yang ada di daerah sendiri. Otonomi daerah memberikan kesempatan dan kebebasan kepada daerah untuk memanfaatkan segala peluang yang ada dengan sebaik-baiknya. Tujuan pemberian otonomi daerah ini, tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 yaitu untuk memacu terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran aktif masyarakat. Selain itu, daerah diharapkan mampu menambah kualitas daya saingnya melalui otonomi daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan, serta potensi dan keragaman daerah.

### **Konsep Investasi**

Sunariyah (2003: 4) mendefinisikan investasi sebagai penanaman modal pada satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya dalam jangka panjang dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang". Penanaman modal (investasi) merupakan pengeluaran yang digunakan untuk investasi atau usaha, atau pengeluaran untuk pembelian barang modal dan fasilitas produksi guna meningkatkan kemampuan produksi dalam perekonomian. Investasi dapat dikatakan sebagai sebagai salah satu komponen yang menghitung jumlah pengeluaran total (Sukirno, 1994)

Halim (2005) membedakan investasi menjadi dua jenis, yaitu investasi fisik dan investasi finansial. Investasi fisik yaitu investasi yang berbentuk barang tahan lama (barang modal) yang digunakan dalam proses produksi berupa aset produksi seperti pembangunan pabrik, pembukaan perkebunan, pembukaan tambang. Dalam ekonomi modern, saat ini investasi keuangan dikenal sebagai investasi pasar modal. Investasi keuangan sering melibatkan kontrak tertulis, sebagai contoh perdagangan saham dan obligasi.

Tujuan berinvestasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan finansial, yang dapat diukur dengan menambahkan pendapatan saat ini dengan nilai sekarang dari pendapatan masa depan. Orang berinvestasi karena berbagai alasan yaitu:

1. Menjalani kehidupan yang lebih baik dan berharga di masa depan. Orang bijak terkadang mencari cara untuk meningkatkan standar hidup mereka, atau setidaknya berusaha mempertahankan agar pendapatannya saat ini tidak turun.
2. Mengurangi tekanan inflasi. Berinvestasi dalam bidang properti, membuat seseorang dapat terhindar dari risiko turunnya nilai properti atau asetnya akibat inflasi.
3. Kebutuhan untuk menghemat pajak. Banyak negara maju menerapkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan investasi masyarakat melalui keringanan pajak bagi mereka yang berinvestasi di bidang usaha tertentu.

Sumber pembiayaan investasi dapat berupa *real estate*, pinjaman pihak ketiga atau tabungan. Investor yang mengurangi konsumsinya saat ini memiliki peluang untuk

menyimpan dana tambahan. Dana simpanan ini apabila diinvestasikan memberikan harapan akan adanya peningkatan daya beli para investor di masa yang akan datang, yang akan berdampak pada meningkatkannya kesejahteraan mereka. Setiap negara yang ingin semakin maju harus memahami tata cara negara maju. Sebagai contoh, setiap negara berkembang harus mampu bersaing untuk membuat investor mencapai keinginan yang diinginkan sehingga akan meningkatkan investasi di negara tersebut. Beberapa faktor yang membuat investor tertarik berinvestasi di suatu negara adalah adanya stabilitas politik, konsistensi hukum yang jelas, sistem dan prospek ekonomi yang menjanjikan, serta kesetaraan sosial.

### **Hubungan Antara Investasi Dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Modal merupakan faktor produksi yang menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi. Lincoln Arsyadi dalam Sihombing (2008) menjelaskan bahwa pembentukan modal adalah kunci pertumbuhan ekonomi suatu negara yang memiliki kendala utama berupa akumulasi modal yang terbatas. Oleh karena itu, pembayaran modal di awal diperlukan untuk memulai penciptaan baru dalam aliran internal, sehingga ketergantungan pada bantuan eksternal dapat diminimalisir dalam jangka panjang.

Adanya akumulasi modal yang baik memungkinkan terjadinya peningkatan produksi dan pendapatan di masa mendatang sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Todaro M.P. dan Smith C (2004) hal-hal yang memungkinkan pertumbuhan produksi atau output di masa depan adalah perolehan pabrik baru, mesin, peralatan, dan bahan mentah yang mampu meningkatkan persediaan modal fisik negara. Modal fisik negara sendiri merupakan jumlah bersih semua barang yang sebenarnya. Investasi langsung produktif ini harus dilengkapi dengan berbagai investasi pendukung seperti: pembangunan jalan tol, akses listrik, akses air bersih dan perbaikan sanitasi yang baik, pembangunan alat komunikasi, dll. yang mutlak diperlukan untuk mendukung dan mengintegrasikan setiap kegiatan ekonomi produktif.

### **Perencanaan Pembangunan Daerah**

Sebelum membahas perencanaan pembangunan daerah, terlebih dahulu harus memahami dasar dari perencanaan pembangunan. Menurut Riyandi dan Bratakusumah (2004) perencanaan pembangunan adalah tahap awal dari proses pembangunan. Sebagai tahap awal pembangunan, perencanaan pembangunan ini menjadi acuan dasar yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan (rencana operasional).

Mengenai kawasan sebagai kawasan pembangunan (region), dimana konsep penataan ruang dibentuk. Sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan yang bertujuan untuk mengadakan perubahan guna memperbaiki kualitas masyarakat, pengelolaan, dan lingkungan hidup di suatu daerah atau wilayah tertentu. Perbaikan tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada, dan harus bersifat menyeluruh, lengkap, namun terarah dengan prinsip keunggulan.



### **Konsep Kawasan Industri**

Di Indonesia, pengertian kawasan industri dapat merujuk pada PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, dimana kawasan industri merupakan kawasan yang menjadi tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang dikembangkan dan dipelihara oleh satu perusahaan taman niaga yang telah memperoleh izin taman niaga. Menurut Marsudi Djogodipuro dalam Pratiknya (2007) kawasan industri (industrial zone) adalah sebidang tanah dengan luas beberapa ratus hektar yang terbagi menjadi kavling-kavling dengan ukuran tertentu sesuai dengan keinginan pengusaha. Kawasan industri tersebut minimal harus dilengkapi dengan jalan antar properti, saluran air limbah dan utilitas listrik yang cukup untuk mengakomodasi kebutuhan kontraktor.

Tujuan pengembangan kawasan industri terlihat jelas dalam Keputusan Pemerintah Republik Indonesia No. 142 tentang Kawasan Industri yang dikeluarkan pada tahun 2015, yaitu untuk mengendalikan penggunaan ruang, meningkatkan pengembangan industri hijau dan mempercepat pertumbuhan kawasan industri, mendorong peningkatan daya saing industri, investasi dan penjaminan keamanan lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, yang dikoordinasikan secara lintas sektoral. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan berbagai usaha dan pertimbangan kebijakan agar mampu berjalan maksimal dan bermanfaat. Menurut Sadono Sukirno (2007: 66) dalam prakteknya penetapan kawasan industri adalah pengembangan kawasan industri untuk meningkatkan daya tarik kawasan dengan harapan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Menghemat pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kegiatan industri dan mempercepat pembangunan daerah,
3. Mengoptimalkan peran pembangunan daerah dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Lebih lanjut, faktor yang lebih krusial dalam mendorong upaya pembentukan kawasan industri adalah adanya potensi margin yang besar bagi industri ketika fasilitas tersebut ditawarkan kepada investor. Oleh karena itu, pembentukan kawasan industri pada dasarnya dimaksudkan untuk merangsang investor. Langkah ini mengurangi masalah pembuatan atau perolehan lokasi bangunan dan dapat mengurangi biaya yang terkait dengan penempatan industri, karena bangunan perusahaan dapat dibeli atau disewa dengan biaya relatif rendah. Selain itu, kawasan industri juga dapat menciptakan berbagai ekonomi eksternal bagi industri tersebut, dimana pertumbuhan industri dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di kawasan industri tersebut. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Kendal, pun mengacu pada teori yang sama dengan uraian di atas.

### **Penelitian Terdahulu**

Zona Ekonomi Khusus (KEK) adalah strategi yang bermanfaat untuk mempromosikan perdagangan, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Menurut Trisniati et al. (2022) dalam melakukan pengembangan KEK tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi melibatkan berbagai pihak sehingga perlu adanya

kerjasama di antara mereka. Selain itu, diperlukan gerak aktif pemerintah untuk memberikan pelatihan berkelanjutan guna mengkomunikasikan dan mendiskusikan visi dan misi yang ingin dicapai bersama dalam pengembangan KEK. Didukung oleh Ramdani (2020) yang menegaskan bahwa pemerintah adalah aktor terbesar dalam pengembangan KEK karena pemerintah merupakan penggiat pada institutional setting aspek spasial. Dimana segala peraturan, perizinan, dan penjelasan secara detail mengenai pembagian kawasan KEK menjadi tanggungjawab pemerintah

Menurut Naeem et al. (2020) KEK memberikan dorongan baru bagi industrialisasi berorientasi ekspor yang terus berkembang di negara-negara berkembang. Oleh karena itu penting bagi setiap zona KEK untuk memiliki visi pembangunan yang jelas berdasarkan keunggulan lokasinya sehingga mampu meningkatkan daya saing dan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Chandra Joshi dan Bhatia (2016) menekankan bahwa masalah efisiensi fungsi kebijakan KEK dalam meningkatkan perekonomian dan menarik investasi tidak dapat disangkal. Dijelaskan lebih lanjut oleh Wang (2013) bahwa adanya program KEK akan meningkatkan investasi asing langsung dan tidak mendesak investasi dalam negeri. Selanjutnya, dengan investasi yang padat, KEK akan mencapai ekonomi aglomerasi dan menghasilkan kenaikan upah bagi pekerja lebih dari kenaikan biaya hidup lokal.

Zeng (2015) menjelaskan bahwa KEK dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai transformasi struktural, dan pengembangan sektor swasta apabila diterapkan dengan benar dalam konteks yang tepat. Namun, hasil yang cukup beragam secara global, dengan keberhasilan, seperti di Asia dan negara-negara Amerika Latin, dan operasi yang sulit, terutama di Afrika Sub-Sahara (SSA) sering menimbulkan perdebatan tentang alasan dan pembenaran untuk menggunakan. Menurut Khan dan Anwar (2016) penyebab utama kegagalan pengembangan potensi KEK di kawasan industri disebabkan oleh adanya inefisiensi organisasi dan tata kelola. Di sebagian negara, seperti China keberhasilan KEK telah menyebabkan kemakmuran, namun secara tidak langsung menciptakan kesenjangan ekonomi antar wilayah (Crane et al., 2018). KEK memiliki berbagai tantangan seperti akses ke tanah, hambatan peraturan, masalah pemukiman kembali dan koordinasi, dan kurangnya infrastruktur eksternal (Zeng, 2016). Oleh karena itu, diperlukan konsistensi pembuat kebijakan dan peran aktif dari pemangku kepentingan lainnya dalam mensukseskan implementasi kebijakan KEK (Munyoro et al., 2017). Selain itu, diperlukan solusi untuk mengurangi kesenjangan regional dengan memperluas pengaruh KEK, atau mendirikan KEK baru di berbagai wilayah negara, untuk memacu investasi dan menutup kesenjangan ekonomi.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif menggunakan kajian literatur, yaitu suatu prosedur penyelesaian masalah yang dilakukan dengan menggambarkan keadaan terkini dari objek penelitian, misalnya orang, organisasi, masyarakat, dan lain-lain berdasarkan fakta (Nawawi, 2007). Metode penelitian deskriptif dapat digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena yang terjadi

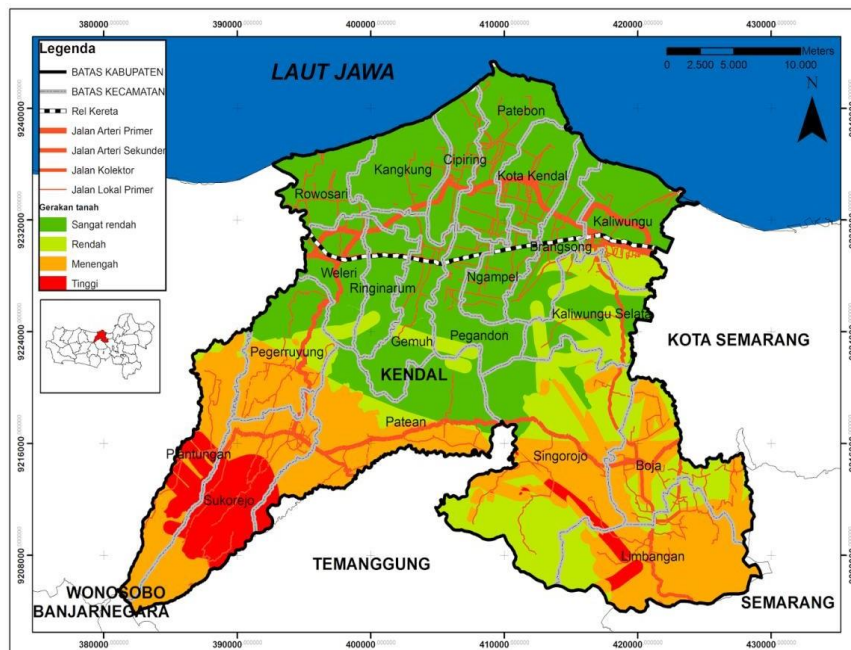


pada populasi atau sampel tertentu. Selain itu, metode ini juga dapat memberikan informasi yang sangat berguna bagi pengambil keputusan dalam mengembangkan strategi atau program yang lebih efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif mampu memberikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari individu yang diamati (Moleong, 2014). Adapun lokasi penelitian ini berada di wilayah Kendal, provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah di wilayah pelayanan Jawa Tengah. Kabupaten Kendal terletak di pesisir utara pulau Jawa dan persis bersebelahan dengan ibu kota provinsi Jawa Tengah, yaitu Semarang. Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten yang memiliki otonomi wilayah sendiri, artinya pemerintah daerah berhak mengatur dan mengelola seluruh sumber daya yang ada di wilayahnya dengan pengawasan dari pemerintah pusat.



Gambar 1. Peta Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal sebagai salah satu bagian dari Provinsi Jawa Tengah memiliki batas administratif, yang dapat digambarkan sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Temanggung. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang dan bagian barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Batang. Letak Kabupaten Kendal ini berada persis di sebelah kota Semarang yang berjarak sekitar 31 km.

Kabupaten Kendal yang memiliki letak di Jalur Pesisir Utara memberikan banyak keuntungan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Kendal itu sendiri. Secara geografis, Kabupaten Kendal terletak antara garis bujur 109°40'-110°18' Lintang Timur dan 6°32'-7°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah sekitar 100.223 hektar.

Topografi wilayah di Kabupaten Kendal terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: kawasan pegunungan di bagian paling selatan dengan ketinggian 0 hingga 2.579 mdpl dan suhu bervariasi antara 25 °C. Kemudian kawasan perbukitan dibagian tengah dan dataran rendah di sepanjang pantai di utara dengan ketinggian 0-10 m dpl dan suhu sekitar 27°. Pemanfaatan atau adanya tata guna lahan dapat menggambarkan pola keruangan suatu kawasan, yang menjadi salah satu aspek dalam perencanaan pembangunan kawasan tersebut. Hal ini dikarenakan bentuk penggunaan lahan kawasan memberikan gambaran tentang aktivitas kawasan tersebut khususnya aktivitas penduduk dan ekonomi mereka. Adapun jenis penggunaan lahan di Kabupaten Kendal meliputi sawah, lahan kering, tambak, hutan, dan lain-lain

### **Profil PT Kawasan Industri Kendal**

Sebagai embrio keberadaan KEK, terlebih dahulu telah hadir Kawasan Industri Kendal. Kawasan Industri Kendal merupakan hasil kerjasama antara PT Jababeka Tbk dengan Sembcorp Development Ltd yang bersinergi mengembangkan kawasan dengan luas 2.700 hektar tersebut menjadi kawasan industri terpadu di Jawa Tengah. Kawasan Industri Kendal direncanakan sebagai kawasan industri bertaraf internasional dengan pengembangan *mixed-use* yang terdiri dari zona industri, perumahan dan komersial untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat dengan biaya produksi yang kompetitif di Indonesia. Kawasan Industri Kendal yang terletak sekitar 21 km sebelah barat Semarang, 20 km dari Bandara Internasional Ahmad Yani dan 25 km dari Pelabuhan Tanjung Emas menjadi lokasi yang cukup strategis dan menguntungkan.

PT Kawasan Industri Kendal merupakan salah satu investor Kabupaten Kendal yang menanamkan modal sebesar Rp8 triliun sampai tahun 2015. Hal ini tidak terlepas dari peran PT Jababeka yang merupakan perusahaan pembangunan kawasan perkotaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang pembangunan lahan (industri, komersial, dll.), infrastruktur (persediaan air bersih, pengelolaan limbah, dll) dan pariwisata (hotel, resor, golf). Kemudaiannya, Sembcorp yang merupakan anak perusahaan Tamsek yang terdaftar di Singapura Exchange, dan merupakan pengembang terkemuka di Asia dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam merencanakan dan menyiapkan lahan kosong untuk menjadi lingkungan perkotaan.

### **4.2. Hasil Penelitian**

#### **Potensi Kawasan Ekonomi Khusus Kendal**

Pemerintah Kabupaten Kendal terus memacu dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dengan membuka lebar investasi bisnis bagi para investor yang ingin berinvestasi. Upaya tersebut di antaranya diawali dengan membuka peluang bagi para pengusaha untuk berinvestasi di Kawasan Industri Kendal (KIK) yang akan menjadi sentra industri terbesar di Jawa Tengah. Lahan KIK dengan luas 2.770 hektare yang berada di Kaliwungu, Kendal memiliki lokasi yang sangat strategis karena berbatasan dengan Kota Semarang. Lahan tersebut sudah tersedia, tinggal menunggu para investor untuk masuk, dan tentunya masih banyak kesempatan. Saat ini, sekitar 500 hektar lahan di sekitar KIK sudah digunakan untuk bangunan pabrik

atau proses produksi berbagai produk. Sedangkan PT Kawasan Industri Jababeka Tbk mengakuisisi lahan seluas 600 hektare atau setara 22,22 persen dari total lahan.

Keuntungan yang diberikan ketika berinvestasi di Kabupaten Kendal adalah ketersediaan lahan yang akan membuat banyak investor melirik Kendal sebagai wilayah strategis untuk berinvestasi. Pengembangan KEK yang merupakan pengembangan lanjut dari KIK dirancang sebagai kawasan industri berstandar internasional dengan konsep *mixed-use development* yang meliputi penyediaan lahan industri, bangunan prefabrikasi (SFB), hunian dan bangunan komersial (pertokoan). Infrastruktur dan sarana pendukung yang akan dibangun antara lain jalan daerah sesuai dengan standar internasional, saluran drainase untuk kawasan bebas banjir, pembangkit listrik, pusat pengolahan air, pusat pengolahan limbah, pusat olah raga dan hiburan, pusat pendidikan dan lain-lain. Untuk layanan yang berpusat pada penyewa, akan ditawarkan layanan *one stop service* yang mencakup layanan perizinan, logistik, keamanan, dan kepegawaian. Sementara itu, faktor pendukung pengembangan KEK juga sudah disiapkan tepat waktu, seperti pelabuhan Tanjung Kendal yang baru saja diresmikan dan diharapkan mampu menarik investor karena memudahkan distribusi bahan baku.

Dilihat dari sisi kebijakan, peraturan daerah juga patut mendapat perhatian investor karena mempermudah perusahaan untuk mendapatkan izin. Selain itu, ada pula jaminan keamanan, karena investor akan cenderung memilih kawasan yang kondusif dan benar-benar menguntungkan sebagai sasaran investasi. Infrastruktur pendukung sedang disiapkan sehingga akses ke kawasan industri akan lebih mudah dan cepat. Lokasi KEK saat ini masih dalam proses pembebasan lahan yang masih dalam proses. Dengan banyaknya investor yang datang, diharapkan akan mampu menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Kendal.

Setiap tahun nilai investasi di Kendal terus mengalami kenaikan mencapai 10 persen. Pada tahun 2011, angkanya mencapai 1,1 triliun rupiah. Tahun 2012 nilai investasi turun menjadi 424 miliar rupiah, kemudian 2013 kembali turun dengan nilai investasi 186 miliar rupiah. Penurunan nilai investasi bukan berarti pelaku usaha hengkang dari Kendal. Hal itu dikarenakan jumlah perizinan baru belum ada, namun jumlah perusahaan cenderung bertumbuh.

### **Permasalahan Pembangunan KEK**

Pada awal pembangunan, dengan nama proyek yaitu KIK, yang dikerjakan selama tahun 2014-2016, ternyata masih belum memenuhi target. Hal ini disebabkan masih banyak permasalahan yang terjadi selama durasi proyek ini. Proyek KIK yang menghabiskan dana sekitar 20 triliun ini masih belum bisa dilaksanakan dengan bersih, atau bisa dikatakan masih ada tindak pidana korupsi yang justru dibawa ke pengadilan tinggi. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam durasi pengembangan KIK adalah:

1. Proyek KIK masih terkendala izin pembangunan yang belum diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jawa Tengah. Isu perizinan pembangunan KIK muncul ketika kewenangan penerbitan izin yang sebelumnya dimiliki oleh Pemerintah

Kabupaten Daerah Kendal, kini dialihkan ke Pemerintah Kabupaten Jawa Tengah, sesuai Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014. Meskipun demikian, walaupun proyek akan tertunda, namun pelimpahan wewenang ini sebenarnya akan mempercepat pelaksanaan *groundbreaking* perusahaan baru yang akan mendirikan jalur komersial di kawasan KIK sendiri. Pemkab Kendal hanya mengurus perizinan yang lebih kecil seperti Unit Aksi Masyarakat Kecil (UKMK) dan perizinan lainnya.

2. Dampak lingkungan yang ditimbulkan proyek KIK berskala nasional juga memiliki dampak negatif terhadap lima desa yang masuk dalam area lahan proyek KIK, yaitu desa Wonorejo, Mororejo dan Krajan Kulon di kecamatan Kaliwungu serta desa Brangsong, Purwokerto dan Turunrejo di kecamatan Brangsong. Selain berdampak negatif pada kelima desa pengguna KIK tersebut, proyek ini juga berdampak langsung pada lingkungan laut. Hal ini dikarenakan KIK berada tepat di sebelah laut. Oleh karena itu, terdapat risiko bahwa lingkungan laut atau pantai utara Kabupaten Kendal, yang sering terjadi abrasi, akan menjadi sasaran utama dampak lingkungan dari proyek KIK. Kajian mengenai dampak lingkungan yang dijelaskan oleh presiden KIK menunjukkan bahwa pihak KIK akan serius dan benar-benar menangani setiap dampak lingkungan yang muncul. Terkait letak Pesisir Utara Kabupaten Kendal berada tepat di seberang Laut Jawa, maka Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) akan terfokus dan menyeluruh. Tentunya pabrik tidak serta merta dibangun tanpa memperhatikan AMDAL yang dapat membahayakan ekosistem laut dan lingkungan desa yang bersinggungan langsung dengan KIK.
3. Permasalahan lain dalam proyek KIK yang akan menjadi salah satu inkubator pembangunan di Kendal adalah belum terselesaikannya masalah pembebasan lahan dengan warga setempat.

#### **4.1. Pembahasan**

##### **Strategi Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal Dalam Meningkatkan Investasi Daerah**

Keberadaan KEK Kendal berperan sangat penting dalam meningkatkan investasi. Sehingga dalam hal ini diperlukan langkah-langkah untuk menghilangkan hambatan dalam pengembangan kawasan industri tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikandukungan dari segi Yuridis dan non Yuridis.

Dari sudut pandang yuridis, hal-hal yang harus dilakukan adalah:

- a) Pemerintah negara harus mengeluarkan peraturan untuk mengarahkan investasi baru ke kawasan industri;
- b) Menegaskan kembali dalam Perda Kabupaten Kendal terkait perizinan yang dibebaskan dalam kawasan Industri sebagaimana diatur dalam peraturan yang lebih tinggi seperti Izin Lokasi, UUG/HO dan lain-lain. Hal ini penting dilakukan agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memungut biaya perizinan yang tidak seharusnya.
- c) Sosialisasi rutin terkait PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri untuk sinkronisasi dan penyesuaian keberadaan kawasan industri dan memberikan

kepastian hukum. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan semua pihak tidak segan-segan mendukung keberadaan kawasan industri.

- d) Peran Pemerintah Kabupaten Kendal dalam merumuskan kebijakan terkait investasi di kawasan industri sehingga produk hukum yang mengatur penanaman modal di Kabupaten Kendal mampu mengakomodasi keberadaan KIK.

Sementara itu, dari segi non yuridis, hal-hal yang harus dilakukan adalah:

- a) Penyusunan rencana pengembangan perkotaan di RDTRK Kabupaten Kendal agar melibatkan Pengusaha Kawasan Industri (HKI) sehingga terintegrasi dalam konsep pengembangan kawasan industri;
- b) Pemerintah Kabupaten Kendal harus menawarkan kemudahan kepada calon investor yang ingin berinvestasi di Kawasan Industri Kendal dalam hal prosedur dan biaya perijinan melalui pelayanan satu atap, dan bekerjasama dengan pengelola kawasan industri untuk memfasilitasi kepentingan calon investor
- c) Pemerintah Kabupaten Kendal harus mendorong keunggulan/peluang daerah untuk memasukkan kawasan industri sebagai salah satu keunggulan Kabupaten Kendal. Jika hal ini dilaksanakan dengan baik, maka secara tidak langsung akan mendukung pengusaha di kawasan industri untuk promosi kepada calon investor;
- d) Memberikan insentif fiskal kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di KEK, seperti keringan tarif PBB, BPHTP, PPN, dan lain-lain.

### **Analisis Perencanaan Pembangunan KEK**

Dalam menjelaskan analisis rencana pembangunan KEK akan dilakukan melalui penggunaan tiga variabel dasar ekonomi politik dan mengaitkannya dengan efek pembangunan KEK itu sendiri. Pada awal pembangunan, berdasarkan rencana pembangunan KIK yang disusun oleh PT Jababeka dan Sembcorp Ltd, terlihat bahwa kekuasaan dan kewenangan terbesar menjadi milik terbesar PT Jababeka yaitu 51% dari total, dan Sembcorp Development Ltd sebesar 49%. Sedangkan pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah Kendal dan Jawa Tengah, yang memberikan izin bangunan, memiliki hak penuh atas pembangunan KIK tersebut. Namun, terjadinya pengalihan kekuasaan dari Pemerintah Kabupaten Kendal ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menyebabkan proyek pembangunan KIK mundur dari target awal. Sehingga pengembangan KEK juga menjadi terhambat. Pelimpahan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah memperjelas bahwa pemerintah memiliki fungsi regulasi terkait izin pembangunan KIK.

Teori dasar regulasi ekonomi mengenai ekonomi politik pembangunan sangat diperlukan untuk menjelaskan bagaimana pengembangan KEK sebagai kota fesyen dan kota mandiri. Fokus dari teori regulasi ekonomi adalah menjelaskan mengenai siapa yang diuntungkan dan siapa yang akan menanggung beban tatanan keuangan yang diciptakan. Dalam hal ini sudah pasti yang diuntungkan adalah PT Jababeka dan Sembcorp Development Ltd sebagai tender yang memenangkan proyek KIK. Kemudian teori regulasi ekonomi akan digunakan untuk menganalisis dan mendiskusikan masalah regulasi dengan berbagai implikasi ganda. Sebagai kota mandiri dan kota mode tekstil pertama di Indonesia, keberadaan pembangunan proyek



KIK tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Adapun manfaat yang diterima masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat perekonomian di Indonesia khususnya di Jawa Tengah dan Kendal, dimana Kendal merupakan kota mode pertama di Indonesia. Artinya, Kendal akan menjadi kota industri dinamis yang akan meningkatkan pendapatan daerah dengan menarik investor dan konsumen fashion global.
2. Dengan dikembangkannya KEK, diharapkan pemerintah akan menaikkan upah minimum regional (UMR) Kendal yang akan meningkatkan kesejahteraan pegawai di Kendal.
3. Menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian Indonesia khususnya Kendal.
4. Peluang terciptanya lapangan kerja baru yang akan merekrut ratusan ribu tenaga kerja
5. Mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, dan pembangunan akses menuju KEK.

Selain itu, pembangunan KEK ini juga memiliki dampak negatif sebagai berikut:

1. Ekosistem laut menjadi rusak sebagai akibat dari pembuangan limbah yang kemungkinan akan dibuang ke laut seperti yang dilakukan oleh PT Texmaco Kaliwungu.
2. Migrasi masuk akan membanjiri Kendal terutama para pengangguran yang akan melamar pekerjaan di industri tekstil.
3. Pengaruh sosial sebagai akibat dari banyaknya peluang usaha akan mengubah gaya hidup di Kendal hampir mirip dengan kota-kota metropolitan.

Analisis dampak positif dan negatif dari pembangunan KEK tentu saja lebih menguntungkan apabila dilihat secara ekonomi, tetapi secara budaya justru ada kemungkinan akan meningkatkan kriminalitas. Meningkatnya kriminalitas ini disebabkan oleh semakin beragamnya kebutuhan hidup yang dituntut secara industrial dan metropolitan. Hal yang mungkin dapat dilakukan adalah meminimalisir dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin akan terjadi kedepannya.

Di sisi lain, relasi dan interaksi sosial masyarakat akan ditransformasikan oleh KEK menjadi interaksi rasionalitas sosial dan rasionalitas ekonomi, dimana ikatan tradisional akan melemah dan digantikan oleh relasi rasional. Selain itu, kapitalisme secara ideologis semakin berkembang di masyarakat sebagai akibat adanya perubahan gaya hidup yang semakin modis dan modern. Selanjutnya perubahan ini akan dimanfaatkan para kapitalis yang meraup keuntungan berlipat. Kepentingan finansial dalam proyek KEK tentu terlihat jelas, karena tujuan utama pengembangan proyek KEK yaitu untuk meningkatkan perekonomian baik perekonomian Indonesia, masyarakat, investor maupun pemangku kepentingan. Selain memiliki kepentingan ekonomi/finansial, proyek KEK juga kepentingan politik dimana ada kekuasaan atau kewenangan dalam pembangunan proyek KEK yang sepenuhnya berada di tangan investor yaitu PT Jababeka, Sembcorp Development Ltd, PT KIK, yang secara legal dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia, khususnya Kendal. Proses politik dan ekonomi dalam pengembangan proyek KEK sebagai percontohan industri tekstil dan



kota mode serta kota mandiri tentunya saling berkesinambungan dengan tujuan utama menghasilkan keuntungan dan meningkatkan perekonomian Indonesia pada tingkat makro maupun mikro. Proses politik yang akan dibangun adalah adanya *contested authority and power* yang akan diperoleh dalam joint venture proyek KEK. Hasil *contested authority and power* akan menentukan nasib dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Selanjutnya, dari proyek KEK akan melahirkan kebijakan baru sebagai akibat dari adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan izin atau melegalkan pembangunan. Sehingga akan terjadi negosiasi dan sengketa dalam pembuatan kebijakan dan disitulah proses politik akan berperan. Proses ekonomi juga memegang peranan yang sangat penting, yaitu untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya tertentu merupakan tujuan utama proses ekonomi. Dalam hal ini, tidak hanya proses ekonomi atau politik saja, tetapi keduanya dapat dilaksanakan secara berdampingan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, kedua proses, baik ekonomi maupun politik, berkelanjutan bagi kedua belah pihak.

Dari kajian literatur, berikut strategi yang dapat diambil oleh pemerintah yang disajikan dalam bentuk analisis SWOT.

Tabel 1. Analisis SWOT

	Kekuatan	Kelemahan
Analisis Lingkungan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara geografis, wilayah Kendal terletak sangat strategis</li> <li>2. Lokasi strategis <i>direct access</i> dengan negara-negara tujuan ekspor dengan dukungan adanya Pelabuhan yang terintegrasi</li> <li>3. Dukungan pemerintah daerah untuk memberikan reduksi pajak dan restribusi selama lima tahun sebesar 75 persen sesuai lingkup kewenangan Pemda.</li> <li>4. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 85/2019 tentang KEK Kendal, sudah ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal yang akan menjadi daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi di Kota Kendal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek Penguasaan Teknologi rendah</li> <li>2. Kemampuan keuangan daerah yang masih sangat minim dalam pengelolaan sebuah kawasan industri seluas 1500 Ha.</li> <li>3. Kurangnya tenaga kerja terampil dalam dunia industri dan terbatasnya '<i>manufacture entrepreneurs</i>' di kalangan pengusaha di wilayah Kendal dan sekitarnya.</li> <li>4. infrastruktur pendukung industri belum secara keseluruhan memadai</li> <li>5. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas UMKM</li> </ol>
Analisis Lingkungan Eksternal		

Peluang	Strategi S-O	Strategi W-O
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan MP3EI guna membangun pelabuhan ekspor internasional dan mengubah Pelabuhan Kendal menjadi pusat logistik internasional</li> <li>2. Komitmen pemerintah untuk memberikan insentif fiskal dan nonfiskal kepada industri di kawasan ekonomi khusus untuk menarik investor. Insentif ini akan menarik investor untuk masuk dan berinvestasi ke KEK Kendal dengan Perencanaan Pemerintah untuk mendirikan Pusat internasional <i>training center</i> di Kendal akan memberikan peluang bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berstandar internasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan dan perluasan pelabuhan menjadi pusat logistik internasional (S-1,2) (O-3).</li> <li>2. Pengembangan sistem transportasi yang menghubungkan kawasan ekonomi khusus dengan sumber bahan baku dan pasar (S-1,3,4) (O-2).</li> <li>3. Mengembangkan pasar bagi industri di wilayah KEK (S-1,2,4,7) (O-1,2,5).</li> <li>4. Pengembangan industri pengolahan di sekitar wilayah KEK (S-3,5,7) (O-1,3,4).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan konsorsium untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah KEK (W-2,4,) (O-2).</li> <li>2. Menyediakan pusat pelatihan internasional untuk pekerja (W-3,5) (O-2).</li> <li>3. Mendorong stimulus fiskal dan non-fiskal pemerintah (W-2) (O-5).</li> <li>4. Pelatihan sumber daya manusia melalui partisipasi dan kerjasama akademisi dan pemerintah (AGB) untuk meningkatkan nilai produk (W-1,3,5) (O-5,6).</li> </ol>
Ancaman	Strategi S-T	Strategi W-T
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkembangnya sentral industri di Pulau Jawa dengan lahan dan infrastruktur yang lebih baik</li> <li>2. Isu Amdal yang masih belum terselesaikan</li> <li>3. Masih ada ganjalan pembebasan tanah warga</li> <li>4. Proses birokrasi pengurusan insentif pajak yang berbelit-belit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peningkatan komunikasi pemasaran (S-1,3,5) (T-1,2,3).</li> <li>7. Mendorong konsep industri ramah lingkungan (industri hijau) (S-6) (T-1,2).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan regulasi transfer teknologi bagi industri yang masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus Kendal (W-1,3) (T-3).</li> <li>2. Membuka pelatihan kerja di industri (W-1,3) (T-3).</li> <li>3. Pengembangan dan dukungan UMKM industri (W-1,3,5) (T-2,3).</li> </ol>

Dari matriks SWOT di atas, beberapa hal dapat kita simpulkan. Pertama, Kawasan Industri Kendal merupakan kawasan industri di Kabupaten Kendal yang merupakan hasil kerjasama dari PT Jababeka Tbk dan Sembcorp Development Ltd. Kedua perusahaan tersebut membantu mengembangkan KIK menjadi kawasan industri terpadu dengan luas 2.700 hektar di Jawa Tengah. Kawasan Industri Kendal direncanakan sebagai kawasan industri berstandar internasional dengan pengembangan mixed-use yang mencakup kawasan industri dan perumahan/komersial untuk memenuhi permintaan biaya produksi yang kompetitif di Indonesia. Pengembangan kawasan industri Kendal diharapkan dapat meningkatkan investasi di Indonesia.

Kedua, dalam pembangunannya kawasan industri Kendal ini masih mengalami beberapa masalah yaitu belum terbitnya izin, dampak lingkungan yang mungkin dihasilkan dari pembangunannya, dan belum selesainya proses pembebasan lahan. Hal

ini menuntut kerjasama yang baik antara para investor dengan pemerintah demi keberlangsungan proyek KIK ini mengingat keuntungan yang ditawarkan sangat besar seperti peningkatan investasi daerah. Selain itu, proyek ini juga akan memberikan peluang bagi masyarakat daerah untuk meningkatkan lapangan kerja. Di sisi lain, investasi KIK juga memiliki implikasi nasional karena dengan semakin meningkatnya investasi ini dapat menggerakkan perekonomian dan mendorong pembangunan ekonomi Indonesia

## 5. Kesimpulan

KEK Kendal merupakan kawasan industri yang berada di Kabupaten Kendal. Kawasan Industri Kendal merupakan hasil kerjasama antara PT Jababeka Tbk dan Sembcorp Development Ltd yang bersinergi untuk mengembangkan KIK sebagai kawasan industri terpadu. Kawasan Industri Kendal mencakup 2.700 hektar lahan yang telah dirancang sebagai kawasan industri berstandar internasional dengan pengembangan mixed-use yang terdiri dari kawasan industri, perumahan dan komersial untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat dengan biaya produksi yang kompetitif di Indonesia. Dengan berkembangnya Kawasan Industri Kendal diharapkan investasi di Indonesia semakin meningkat.

Masih terdapat beberapa permasalahan dalam pembangunan kawasan industri Kendal, yaitu izin yang belum diberikan, potensi dampak lingkungan dari pembangunannya, dan pembebasan lahan yang terus berlanjut. Hal ini membutuhkan kerjasama yang baik antara investor dan pemerintah terkait keberlangsungan proyek KEK ini. Dengan adanya proyek KEK juga dapat mendorong investasi daerah sekaligus memberikan peluang bagi masyarakat pedesaan di Kendal untuk meningkatkan lapangan kerja. Selain itu, proyek KEK juga berimplikasi secara nasional karena adanya investasi di KEK mampu memutar roda perekonomian sekaigus meningkatkan pembangunan ekonomi negara.

## Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada civitas akademika Fakultas Ekonomi Universitas Tidar yang telah mendukung terselesainya penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini.

## Referensi

- Adisasmita, R. (2005). *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Chandra Joshi, M., & Bhatia, R. (2016). A comparative study of Special Economic Zones (SEZS) in India and China Pratham cycles View project International Marketing View project A Comparative Study of Special Economic Zones (Sezs) In India and China 4(7).
- Crane, B., Albrecht, C., Duffin, K. M., & Albrecht, C. (2018). China's special economic zones: An analysis of policy to reduce regional disparities. *Regional Studies, Regional Science*, 5(1), 98–107.

- Halim, Abdul. 2005. *Analisi Laporan Keuangan*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Irawan, & Suparmoko. (1996). *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Khan, K., & Anwar, S. (2016). *Special Economic Zones (SEZs) and CPEC: Background, Challenges and Strategies*.
- Lepi T. Tarmidi. (1992). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Pusat Antar Universitas - Studi Ekonomi Universitas Indonesia.
- Maramis, J. B. (2013). *Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Perekonomian Daerah. Manado*. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi.
- Munyoro, G., Zomani, D., & Mhere-Chigunhah, B. (2017). The Significance of Special Economic Zones In The Economic Development Of Zimbabwe: A Case Study Of Zim Asset. *BEST: International Journal of Management, Information*, 5(5), 1–18.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Naeem, S., Waheed, A, & Khan, M. N. (2020). Drivers and Barriers for Successful Special Economic Zones (SEZs): Case of SEZs under China Pakistan Economic Corridor. *Sustainability*, 12(11), 4675. Doi:10.3390/Su12114675, 12(11), 1–18.
- Pratiknya, P. (2007). *Pengembangan Kawasan Industri Dalam Meningkatkan Investasi di Kota Semarang*. Doctoral dissertation, Program Sarjana Universitas Diponegoro.
- Ramdani, Z. A. (2020). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Planoeath*, 5(1), 1–6.
- Riyandi., & Bratakusumah, D. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sihombing, K. (2008). *Pengaruh Aglomerasi Modal Tenaga Kerja dan Kepadatan Penduduk Terhadap Petumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak*. Fakultas Ekonomi Undip.
- Sukirno, S. (1985). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Kebijaksanaan*. Jakarta: LPFE-UI.
- Sukirno, S. (1994). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Edisi ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2007. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunariyah. (2003). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Suryana. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Todaro M.P., & Smith C, S. (2004). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Trisniati, E., Cadith, J., Sapto Nugroho, K. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Collaborative Governance In Developing Special Economic Zone. *Jurnal Governansi*, 8(1), 1–18.

- Wang, J. (2013). The economic impact of special economic zones: Evidence from Chinese
- Zeng, D. Z. (2015). Global Experiences with Special Economic Zones Focus on China and Africa. <http://econ.worldbank.org>.
- Zeng, D. Z. (2016). Special Economic Zones: Lessons from The Global Experience. PEDL Synthesis Paper Series, 1(1), 1–9.